Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Ratu Kencono Wulan dalam Jaringan Politik Keraton Ngayogyakarta Tahun 1805-1812 M

Akhmad Rizal Baihaqi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Penulis Korespondensi: rizalbehaqi@gmail.com
Rochimah
UIN SunanAmpel Surabaya
rochimah@uinsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta pada tahun 1805-1812. Permasalahan penelitian berangkat dari posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik keraton serta hubungan kekerabatan yang berkaitan dengannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta serta mengkaji bagaimana jaringan kekerabatan yang berkaitan dengannya memengaruhi dinamika politik keraton. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Analisis menggunakan teori jaringan sosial untuk mengidentifikasi hubungan Ratu Kencono Wulan dengan aktor-aktor di lingkungan keraton melalui jaringan kekerabatan dan patronase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik keraton berkaitan dengan kedudukannya sebagai permaisuri serta keterhubungannya dengan lingkungan elite keraton. Jaringan kekerabatan yang berkaitan dengannya menjadi bagian dari hubungan antarelite yang berhubungan dengan dinamika politik Keraton Ngayogyakarta pada 1805-1812.

Kata Kunci: *jaringan sosial, Keraton Ngayogyakarta, kekerabatan, patronase, Ratu Kencono Wulan*

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-19, Keraton Ngayogyakarta menghadapi perubahan dalam konstelasi politik yang ditandai oleh meningkatnya intervensi pemerintah kolonial dan ketegangan di lingkungan internal keraton. Kondisi tersebut semakin terlihat pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II, terutama sejak Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal pada 1808. Kebijakan Daendels yang memperluas campur tangan pemerintah kolonial terhadap keraton mendapat penolakan dari Sultan Hamengku Buwono II dan berkembang menjadi konflik politik. Ketegangan tersebut semakin kompleks karena berlangsung bersamaan dengan persaingan di antara elite keraton. Perkembangan politik itu mencapai titik penting ketika Sultan Hamengku Buwono II

diturunkan dari takhta pada 1810 dan kembali berkuasa pada 1811, sebelum Keraton Yogyakarta diserang pasukan Inggris pada 1812 (Marihandono, 2008).

Dalam perkembangan politik tersebut, perempuan dari lingkungan keraton juga berada dalam lingkungan kekuasaan yang mengalami perubahan. Salah satu tokoh yang menarik untuk dikaji adalah Ratu Kencono Wulan, permaisuri ketiga Sultan Hamengku Buwono II. Carey dan Houben (2024), menunjukkan bahwa perempuan bangsawan Jawa pada akhir abad XVIII hingga awal abad XIX memiliki ruang untuk mengambil inisiatif dalam kehidupan politik dan ekonomi. Ratu Kencono Wulan merupakan salah satu perempuan yang menempati posisi penting di lingkungan Keraton Ngayogyakarta sebagai permaisuri Sultan Hamengku Buwono II, Kedudukannya tersebut menempatkannya dekat dengan lingkungan kekuasaan dan berbagai hubungan antarelite yang berkembang di dalam keraton.

Keberadaan Ratu Kencono Wulan dalam lingkungan politik keraton juga berkaitan dengan hubungannya dengan sejumlah elite Yogyakarta. Salah satunya terlihat melalui perkawinan putrinya, Raden Ajeng Suratmi atau Ratu Anom, dengan Raden Tumenggung Notodiningrat, putra Pangeran Notokusumo, pada 1805 (Carey, 2019: 264). Hubungan tersebut mempertautkan lingkungan keluarga Ratu Kencono Wulan dengan keluarga Pangeran Notokusumo yang memiliki posisi dalam perkembangan politik Yogyakarta pada awal abad XIX. Ratu Kencono Wulan juga disebut dalam kajian mengenai konstelasi politik di sekitar Pangeran Notokusumo pada periode tersebut. Hubungan-hubungan tersebut menjadi konteks penting untuk melihat posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta.

Kajian mengenai perempuan dalam politik Jawa telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Carey dan Houben membahas ruang keterlibatan perempuan bangsawan dalam kehidupan politik dan ekonomi Jawa, termasuk Ratu Kencono Wulan, Sementara itu, Mahardi membahas konstelasi politik Pangeran Notokusumo dan menyinggung keterhubungan Ratu Kencono Wulan dengan sejumlah elite keraton. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai posisi perempuan dan perkembangan politik Yogyakarta pada awal abad XIX. Namun, Ratu Kencono Wulan belum menjadi fokus utama penelitian yang secara khusus melihat posisinya dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta serta hubungan kekerabatan yang berkaitan dengan dinamika politik pada 1805-1812.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta pada 1805-1812 serta mengkaji jaringan kekerabatan Ratu Kencono Wulan dalam kaitannya dengan dinamika politik keraton. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah politik dan sejarah perempuan dengan memperlihatkan posisi perempuan dalam konfigurasi kekuasaan Keraton Ngayogyakarta pada awal abad XIX.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Hajar et al., 2026). Metode tersebut digunakan untuk menelusuri, menguji, menafsirkan, dan merekonstruksi sumber-sumber yang berkaitan dengan Ratu Kencono Wulan dan dinamika politik Keraton Ngayogyakarta pada 1805-1812. Penelitian ini menggunakan pendekatan jaringan sosial untuk melihat keterhubungan Ratu Kencono Wulan dengan aktor-aktor politik melalui hubungan kekerabatan. Dengan demikian, penelitian ini membahas posisi Ratu Kencono Wulan dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta pada 1805-1812 serta jaringan kekerabatan yang berkaitan dengan dinamika politik keraton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi dan Peran Ratu Kencono Wulan dalam Konstelasi Politik Keraton

Ratu Kencono Wulan menempati posisi penting dalam lingkungan politik Keraton Ngayogyakarta pada awal abad XIX. Kedudukannya sebagai permaisuri Sultan Hamengku Buwono II menempatkannya di lingkungan inti kekuasaan keraton dan memberikan kedekatan dengan pusat kekuasaan Sultan. Posisi tersebut membuat Ratu Kencono Wulan berada dalam lingkungan keluarga dan elite keraton yang berhadapan dengan berbagai kepentingan politik pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II.

Kedudukan Ratu Kencono Wulan juga berkaitan dengan latar belakang sosialnya. Carey dan Houben menempatkannya sebagai perempuan yang berasal dari lingkungan masyarakat lapis bawah dan memiliki keterkaitan dengan kegiatan perdagangan di Pasar Beringharjo. Ia kemudian masuk ke lingkungan elite keraton dan menjadi permaisuri Sultan Hamengku Buwono II. Kedudukannya sebagai *garwa padmi* memberikan akses yang lebih dekat terhadap lingkungan kekuasaan Sultan. Carey dan Houben (2024), menunjukkan bahwa perempuan dari lingkungan elite Jawa pada masa tersebut memiliki ruang untuk mengambil inisiatif dalam kehidupan politik dan ekonomi. Dalam konteks

Ratu Kencono Wulan, kedudukan sebagai permaisuri menjadi dasar penting untuk memahami posisinya dalam lingkungan politik Keraton Ngayogyakarta.

Posisi tersebut berada dalam konteks politik keraton yang mengalami perubahan pada awal abad XIX. Kehidupan politik Keraton Ngayogyakarta pada masa itu diwarnai persaingan antarelite dan meningkatnya campur tangan pemerintah kolonial. Perubahan tersebut semakin terasa setelah Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal pada 1808 dan menerapkan kebijakan yang memperluas campur tangan pemerintah kolonial terhadap kerajaan-kerajaan Jawa (Juwono, 2022). Hubungan antara Sultan Hamengku Buwono II dan pemerintah kolonial kemudian berkembang menjadi persoalan politik yang turut memengaruhi hubungan antarkelompok di lingkungan keraton. Persaingan mengenai kedudukan dan pengaruh di lingkungan istana berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan pemerintah kolonial terhadap Yogyakarta (Bahauddin, 2022).

Dalam perkembangan tersebut, Ratu Kencono Wulan terhubung dengan konstelasi politik di sekitar Pangeran Notokusumo. Notokusumo merupakan salah satu tokoh elite yang memiliki posisi penting dalam perkembangan politik Yogyakarta pada masa tersebut. Mahardi mencatat Ratu Kencono Wulan sebagai salah satu tokoh yang berada dalam lingkungan politik Notokusumo, bersama sejumlah elite lainnya, termasuk Raden Ronggo Prawirodirjo III (Mahardi, 2022: 70). Keterangan tersebut menempatkan Ratu Kencono Wulan dalam salah satu konstelasi elite yang berkembang di lingkungan Keraton Ngayogyakarta pada awal abad XIX.

Kedudukan Ratu Kencono Wulan semakin terlihat ketika hubungan antara elite keraton dan pemerintah kolonial mengalami ketegangan. Carey mencatat bahwa Daendels mengaitkan Ratu Kencono Wulan dengan Pangeran Notokusumo, Raden Tumenggung Notodiningrat, dan Raden Ronggo dalam persoalan politik yang berkembang di Yogyakarta (Carey, 2019). Penyebutan Ratu Kencono Wulan bersama sejumlah tokoh tersebut memperlihatkan bahwa keberadaannya diperhitungkan dalam persoalan politik yang berkembang di lingkungan keraton. Namun, pengaitan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial perlu ditempatkan dalam konteks pandangan dan kepentingan pemerintah kolonial terhadap konflik politik Yogyakarta sehingga tidak dapat dijadikan bukti tunggal mengenai keterlibatan aktif Ratu Kencono Wulan.

Pada sekitar tahun 1810 M, konflik politik Yogyakarta semakin meningkat seiring dengan tekanan pemerintah kolonial terhadap Sultan Hamengku Buwono II dan

kelompok-kelompok elite di lingkungan keraton. Dalam perkembangan tersebut, Ratu Kencono Wulan tetap muncul dalam lingkungan politik yang berkaitan dengan Notokusumo dan Notodiningrat (Bahauddin, 2022). Keberadaannya dalam berbagai catatan mengenai konflik tersebut menunjukkan bahwa Ratu Kencono Wulan menempati posisi yang berada di sekitar pusat hubungan politik keraton pada masa meningkatnya ketegangan dengan pemerintah kolonial.

Perkembangan politik hingga tahun 1812 M, memperlihatkan bahwa posisi Ratu Kencono Wulan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai permaisuri Sultan Hamengku Buwono II dan keterhubungannya dengan lingkungan elite Keraton Ngayogyakarta. Kedudukannya sebagai bagian dari keluarga Sultan, sekaligus keterhubungannya dengan sejumlah tokoh elite, menempatkannya dalam konstelasi politik keraton pada awal abad XIX. Posisi tersebut menjadi konteks penting untuk memahami hubungan kekerabatan dan patronase yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Jaringan Kekerabatan dan Patronase Ratu Kencono Wulan Memengaruhi Dinamika Politik Keraton Ngayogyakarta pada 1805-1812

Kedudukan Ratu Kencono Wulan dan Jaringan Kekerabatan di Keraton Yogyakarta (1805-1808)

Pada awal abad ke-19, Keraton Yogyakarta berada dalam situasi politik yang dipengaruhi oleh hubungan antara keluarga kerajaan, pejabat pemerintahan keraton, dan kekuatan kolonial. Sultan Hamengku Buwono II berusaha mempertahankan kewibawaan pemerintahannya, sedangkan pemerintah kolonial berupaya memperluas campur tangan terhadap urusan keraton. Dalam situasi tersebut, hubungan keluarga di lingkungan istana menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan jaringan politik. Ratu Kencono Wulan, salah satu istri Sultan Hamengku Buwono II, menempati posisi yang menarik untuk dikaji karena keterlibatannya dalam lingkungan keluarga kerajaan beririsan dengan persaingan antarelite pada masa itu.

Carey dan Houben (2024) menggambarkan Ratu Kencono Wulan sebagai perempuan yang berasal dari lingkungan sosial di luar lapisan utama bangsawan, sebelum kemudian memperoleh kedudukan di lingkungan istana. Keduanya juga menyoroti aktivitas ekonominya dan kemampuannya memanfaatkan kedudukan di keraton untuk memperoleh keuntungan dari berbagai proyek. Gambaran ini menunjukkan bahwa posisi

Ratu tidak hanya berkaitan dengan hubungan perkawinan dengan Sultan, tetapi juga dengan kemampuannya membangun kedudukan dan mengakses sumber daya di lingkungan istana. Meski demikian, keterangan mengenai latar belakang sosial Ratu perlu dipahami sesuai dengan sifat sumber yang digunakan Carey dan Houben, termasuk adanya dugaan mengenai keluarganya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan di Pasar Beringharjo.

Salah satu peristiwa yang penting untuk menelusuri hubungan keluarga Ratu Kencono Wulan adalah perkawinan putrinya, Raden Ajeng Suratmi, dengan Raden Mas Notodiningrat pada 1805. Notodiningrat merupakan putra Pangeran Notokusumo, adik Sultan Hamengku Buwono II. Perkawinan tersebut menghubungkan keluarga Ratu Kencono Wulan dengan keluarga Notokusumo melalui hubungan besan. Peter Carey (2019) membahas hubungan keluarga dan perkawinan dalam lingkungan elite Yogyakarta pada periode tersebut, sedangkan Juwono (2022) menempatkan perkawinan Raden Ajeng Suratmi dan Notodiningrat sebagai salah satu latar hubungan Ratu Kencono Wulan dengan kelompok Notokusumo.

Hubungan keluarga tersebut kemudian memperoleh arti penting ketika persaingan politik di keraton semakin terbuka. Pangeran Notokusumo bukan sekadar anggota keluarga Sultan, melainkan tokoh yang memiliki kepentingan politik dan kemudian berhadapan dengan sejumlah pejabat yang memperoleh dukungan pemerintah kolonial. Melalui perkawinan putrinya, Ratu Kencono Wulan terhubung dengan keluarga yang memiliki kepentingan tersendiri dalam perebutan pengaruh di lingkungan keraton. Akan tetapi, perkawinan pada 1805 tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hubungan politik tersebut telah dirancang sejak awal. Makna politiknya baru dapat dipahami dengan melihat perkembangan hubungan antartokoh pada tahun-tahun berikutnya.

Pada periode yang sama, kedudukan Patih Danurejo II menjadi salah satu unsur penting dalam pemerintahan Yogyakarta. Danurejo II telah menjabat sebagai patih sejak 1799 dan memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan sekaligus pemerintah kolonial. Menurut Juwono (2022), Danurejo II dan Pangeran Notokusumo berada dalam posisi politik yang berlawanan. Perbedaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kewenangan pemerintahan serta hubungan masing-masing tokoh dengan kekuasaan kolonial. Keberadaan dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda memperlihatkan bahwa pemerintahan keraton bukanlah ruang politik yang sepenuhnya seragam, sekalipun

para tokohnya terhubung melalui hubungan keluarga dan kedudukan di lingkungan istana.

Intervensi Daendels dan Keterlibatan Ratu Kencono Wulan dalam Persaingan Elite Keraton (1808-1811)

Perubahan situasi politik Yogyakarta semakin nyata setelah Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808. Pemerintah kolonial berusaha memperkuat kendalinya atas kerajaan-kerajaan Jawa, termasuk melalui pengaturan hubungan diplomatik dan tata cara penghormatan terhadap pejabat Eropa. Kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan karena menyentuh kedudukan simbolis dan kewibawaan penguasa Jawa. Dalam konteks Yogyakarta, persoalan tersebut memperuncing hubungan antara Sultan Hamengku Buwono II, pejabat keraton, dan pemerintah kolonial (Mahardi, 2024).

Persaingan yang berkembang pada periode ini tidak hanya melibatkan Sultan dan Daendels. Patih Danurejo II, Pangeran Notokusumo, dan sejumlah bangsawan juga memiliki kepentingan yang berbeda dalam menghadapi perubahan politik. Danurejo II dipandang dekat dengan pemerintah kolonial, sedangkan Notokusumo menjadi salah satu tokoh yang berhadapan dengan dominasi patih dan campur tangan Belanda. Juwono (2022) menjelaskan bahwa pertentangan tersebut melibatkan kelompok elite yang lebih luas, termasuk Raden Ronggo Prawirodirjo dan Ratu Kencono Wulan. Hal demikian dapat dijadikan sebagai bentuk validitas atas konflik yang berlangsung tidak cukup dijelaskan sebagai perselisihan pribadi antara Sultan dan pejabat kolonial, tetapi perlu ditempatkan dalam persaingan mengenai kewenangan, kedudukan, dan arah hubungan keraton dengan kekuatan asing.

Ketegangan antara kelompok-kelompok elite tersebut juga terlihat dalam peristiwa yang menimpa Raden Ronggo Prawirodirjo. Pada Desember 1810, Raden Ronggo tewas setelah konflik dengan pemerintah kolonial. Peristiwa ini menjadi salah satu penanda meningkatnya tekanan Daendels terhadap tokoh-tokoh yang menentang atau dianggap mengganggu kepentingan pemerintah kolonial. Juwono (2022) menghubungkan perkembangan tersebut dengan tindakan terhadap Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat, yang kemudian mengalami penahanan. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa persaingan elite telah berkembang menjadi persoalan yang melibatkan tekanan politik dan kekuatan kolonial secara langsung.

Penahanan Notokusumo dan Notodiningrat memperlihatkan bahwa hubungan kekerabatan Ratu Kencono Wulan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Tokoh-tokoh yang memiliki hubungan keluarga dengannya mengalami tekanan, sementara persaingan antara kelompok Notokusumo dan Danurejo II berlangsung dalam lingkungan pemerintahan yang semakin dipengaruhi Belanda. Akan tetapi, dampak situasi tersebut terhadap tindakan pribadi Ratu perlu dibedakan dari dampaknya terhadap keluarga yang terhubung dengannya. Tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Ratu memimpin perlawanan atau menentukan strategi kelompok Notokusumo. Yang dapat ditunjukkan ialah bahwa hubungan keluarganya menempatkan Ratu dalam lingkungan politik yang sedang mengalami tekanan dan perubahan.

Di samping keterlibatannya dalam jaringan keluarga, aspek ekonomi juga memberikan gambaran mengenai sumber pengaruh Ratu Kencono Wulan (Wijaya, 2023). Carey dan Houben (2024) menggambarkan Ratu sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan usaha dan memanfaatkan kedudukannya untuk meminta bagian dari keuntungan proyek. Keterangan ini memperlihatkan adanya hubungan antara kedudukan di istana dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam lingkungan pemerintahan yang mempertemukan jabatan, tanah, dan keuntungan material, sumber daya semacam itu dapat menjadi unsur penting dalam hubungan patronase.

Secara keseluruhan, peristiwa 1808-1811 memperlihatkan perubahan dari hubungan keluarga yang sebelumnya dapat ditelusuri melalui perkawinan menjadi jaringan yang beririsan dengan konflik politik terbuka. Intervensi Daendels, pertentangan antara Notokusumo dan Danurejo II, kematian Raden Ronggo, serta penahanan Notokusumo dan Notodiningrat membentuk konteks bagi keterlibatan Ratu Kencono Wulan.

Pergantian Kekuasaan Kolonial, Geger Sepehi, dan Perubahan Lingkungan Politik Ratu Kencono Wulan (1811–1812)

Peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Inggris pada 1811 mengubah situasi politik di Jawa. Setelah Inggris mengambil alih pemerintahan kolonial, tokoh-tokoh keraton yang sebelumnya mengalami tekanan mulai menghadapi keadaan politik yang berbeda. Dalam konteks Yogyakarta, Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat kemudian memperoleh kesempatan untuk kembali tampil dalam lingkungan politik keraton. Perkembangan ini menandai perubahan dari masa ketika Daendels berusaha

memperkuat kendali kolonial menuju masa ketika pemerintahan Inggris menyusun kembali hubungan dengan para penguasa Jawa (Carey, 2024; Juwono, 2022).

Perubahan tersebut tidak berarti bahwa persaingan internal keraton berakhir. Sultan Hamengku Buwono II kembali menduduki takhta setelah pergantian kekuasaan kolonial, sedangkan hubungan antara Sultan, kelompok Notokusumo, dan pejabat keraton tetap dipengaruhi oleh pengalaman konflik pada masa sebelumnya. Menurut Juwono (2022), Danurejo II akhirnya terbunuh oleh Sultan Hamengku Buwono II setelah dipandang sebagai tokoh yang dekat dengan pemerintah kolonial. Peristiwa tersebut memperlihatkan perubahan keseimbangan kekuasaan di lingkungan keraton dan berakhirnya kedudukan salah satu tokoh yang sebelumnya memiliki peran penting dalam pemerintahan.

Situasi kembali berubah ketika pasukan Inggris menyerang Keraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sepehi. Serangan tersebut menyebabkan kekalahan Sultan Hamengku Buwono II dan perubahan besar dalam susunan kekuasaan keraton. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah Yogyakarta karena memperlihatkan kemampuan pemerintah Inggris menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya terhadap penguasa setempat.

Serangan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812 membawa perubahan nyata bagi keluarga kerajaan dan lingkungan elite istana. Dalam *Inggris di Jawa (1811-1816)*, Peter Carey (2024) merekonstruksi serangan tersebut melalui *Babad Panular*, catatan sejarah yang ditulis Pangeran Aryo Panular dari sudut pandang lingkungan keraton. Setelah pertahanan keraton runtuh, pasukan Inggris menjarah dan mengambil berbagai barang milik istana. Dampak kekalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Sultan Hamengku Buwono II, tetapi juga oleh kerabat dan orang-orang yang berada di lingkungan keraton.

Salah satu keterangan yang berkaitan dengan keluarga Ratu Kencono Wulan adalah nasib dua saudara laki-lakinya, Raden Tumenggung Prawirowinoto dan Raden Prawirodiwiryo. Menurut uraian Peter Carey dalam *Kuasa Ramalan*, keduanya berusaha bersembunyi di kediaman perempuan setelah keraton jatuh. Namun, mereka kemudian dipaksa mengangkut peti-peti besar yang biasa digunakan untuk menyimpan benda pusaka keraton menuju keresidenan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kekalahan Yogyakarta berdampak langsung terhadap anggota keluarga dan lingkungan dekat Ratu Kencono Wulan, bahkan mereka yang tidak memegang kedudukan sebagai penguasa

utama (Carey, 2019). Keterangan tersebut memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai perubahan situasi politik setelah Geger Sepehi. Jaringan keluarga yang sebelumnya berada dalam lingkungan kekuasaan keraton menghadapi keadaan baru ketika pasukan Inggris menguasai istana dan mengambil barang-barang kerajaan.

KESIMPULAN

Ratu Kencono Wulan menempati posisi penting dalam konstelasi politik Keraton Ngayogyakarta pada 1805-1812 melalui kedudukannya sebagai istri Sultan Hamengku Buwono II, hubungan kekerabatan, dan keterlibatannya dalam lingkungan elite keraton. Perkawinan putrinya, Raden Ajeng Suratmi, dengan Raden Mas Notodiningrat pada 1805 menghubungkan keluarga Ratu dengan Pangeran Notokusumo. Hubungan tersebut menjadi relevan ketika intervensi Daendels sejak 1808 memperuncing persaingan antara kelompok Notokusumo dan Patih Danurejo II. Dengan demikian, posisi Ratu Kencono Wulan tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya di lingkungan kerajaan, tetapi juga oleh hubungannya dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam persaingan politik pada awal abad XIX.

Jaringan kekerabatan Ratu Kencono Wulan beririsan dengan perubahan dinamika politik keraton, terutama ketika konflik elite berkembang menjadi tekanan kolonial, penahanan Notokusumo dan Notodiningrat, serta kematian Raden Ronggo Prawirodirjo pada 1810. Pergantian kekuasaan kolonial pada 1811 dan serangan Inggris dalam peristiwa Geger Sepehi pada 20 Juni 1812 kemudian mengubah susunan kekuasaan yang menjadi tempat jaringan tersebut berkembang. Selain hubungan keluarga, aktivitas ekonomi Ratu sebagaimana digambarkan Carey dan Houben menunjukkan adanya dimensi sumber daya dalam kedudukannya di lingkungan istana. Namun, bukti yang tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa Ratu secara langsung mengendalikan keputusan politik kelompok Notokusumo. Oleh karena itu, pengaruhnya lebih tepat dipahami melalui keterhubungannya dengan jaringan keluarga dan elite keraton dalam menghadapi perubahan politik pada periode 1805-1812.

DAFTAR PUSTAKA

Manuskrip

Babad Bĕdhah Ing Ngayogyakarta

Buku

Carey, Peter. 2019. "*Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855"*. Jakarta: Kompas.

Carey, Peter. *"Inggris di Jawa 1811–1816: Babad Panular Kisah Serangan Inggris di Yogyakarta"*. Diterjemahkan oleh Nin Bakdisoemanto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024.

Carey, Peter, dan Vincent J. H. Houben. 2024. "*Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII–XIX"*. Yogyakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal

Uddin, Baha. (2022). *"Kedudukan dan relasi politik Tan Jin Sing pada peristiwa Geger Sepehi dalam Babad Panular, Babad Mangkubumi, dan Babad Pakualaman"*. Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya, 23 (2)

Juwono, H. (2022). *"Perjuangan Pangeran Notokusumo dan Ir. Sukarno: Kajian komparatif historis."* MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 13, (2).

Nasta Ayundra Oktavian Mahardi. (2024). *"Sultan Hamengkubawana II and The Dutch In The Political Vortex of the Kasultanan Yogyakarta (1808–1811),*" SWARNADWIPA: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya 8, no. 2.

Hajar, Imam Ibnu, Muhammadudy Hisyam Hawari, and Muhammad Syiham Rabbani. *"Dari Narasi ke Analisis: Peran Pendekatan dan Teori dalam Penelitian Sejarah."* Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization 9, no. 2 (March 2026).

Wijaya, M. R. D. (2023). *"Perkembangan peran perempuan Indonesia yang tercatat dalam sejarah dari masa kuno hingga penjajahan"*. Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 3 (2).

Majid, G. M. (2019). *"Diplomatic correspondence: A comparative study on Malay and Javanese letters in 1800s." IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 2 (2).